**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Situasi dunia pasca perang dingin tidak lagi terfokus pada persaingan dan perseteruan dalam bidang *power* (kekuatan) militer, kekuasaan dan ideologi semata. Perang antarnegara yang menjadi topik utama tidak lagi begitu mengemuka. Konflik yang sering terjadi adalah konflik di dalam wilayah Negara itu sendiri seperti konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. Konflik-konflik tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian. Sejarah sendiri telah membuktikan bahwa perang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Walaupun konflik tersebut mempunyai masalah di tingkat internal, akan tetapi konflik tersebut bisa menyebar hingga jauh keluar perbatasan geografisnya sendiri. Karena saling ketergantungan antar negara semakin besar dalam memenuhi *National* *Interest*-nya masing-masing, masyarakat dunia telah menyadari betapa pentingnya menciptakan suatu kerjasama internasional yang dapat menjamin perdamaian dunia.

Afrika merupakan sebuah benua yang ramai akan sorotan dari kacamata dunia internasional. Benua terbesar kedua setelah Benua Asia ini terkenal dengan karakteristiknya yang cukup unik dan ragam sumber daya yang melimpah. Akan tetapi, Afrika seolah menjelma sebagai benua yang dinilai terpuruk. Dengan kondisi sosial yang cenderung tidak stabil, benua ini menjadi sarat akan potensi konflik antara negara-negara didalamnya.

Peperangan pun telah lama terjadi di wilayah Afrika. Setelah negara-negara di Afrika lepas dari jajahan negara-negara Eropa, negara-negara di Afrika jatuh kepada para pemimpin yang diktator. Konflik di negara-negara Afrika pun sulit untuk dicarikan solusi menuju kepada suatu perdamaian yang abadi. Negara-negara di Afrika yang kental dengan konflik yaitu antara lain Rwanda, Kongo, Nigeria, Sudan, Kenya, dan juga Somalia yang sudah menelan korban jiwa yang cukup banyak.[[1]](#footnote-1)

Konflik di Afrika masih terus bergejolak hingga kini, Afrika merupakan wilayah yang tidak lepas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan akibat dari konflik yang terus-menerus melanda. Begitu juga yang terjadi di negara Somalia, sebagai sebuah negara yang sering dilanda konflik, Somalia tidak lepas dari kekerasan, kekacauan, dan juga, Somalia merupakan negara dengan jumlah pengungsi yang besar. Somalia terus-menerus dilanda konflik sejak tahun 1991 saat pemerintahan Siad Barre yang otoriter jatuh dan sejak saat itu belum ada pemerintahan yang sungguh-sungguh dapat mengatur Somalia dengan baik.

Kondisi negara yang berada di kawasan Afrika Timur ini kian memprihatinkan. Negara miskin ini dipenuhi banyak derita dan seolah tidak berhenti dirundung masalah yang datang bertubi-tubi. Semakin maraknya konflik yang terjadi seperti krisis pangan hingga perang saudara menyebabkan Somalia secara drastis mengalami instabilitas sosial, ekonomi dan politik.[[2]](#footnote-2)

Republik Demokratik Somalia adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur Afrika, di Samudra Hindia dan Teluk Aden. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia dan Kenya. Keseluruhan populasi Somalia diperkirakan sekitar 10 juta jiwa. Negara ini juga memiliki populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Kelompok etnis di negara ini mencakup Somalia (98%) dan Arab serta Asia (2%). Bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Arab dan Somalia (keduanya bahasa resmi), Inggris juga Itali. Islam (Sunni) adalah agama utama. Tingkat baca tulis diperkirakan sekitar (40%).[[3]](#footnote-3)

Pemerintah negara ini pada tahun 1990 berbentuk republik. Berdasarkan konstitusi tahun 1969, presiden didominasikan oleh Komite Pusat Partai Sosialis Revolusioner Somalia (*Central Committee of the Somali Revolutionary Socialist Party*) dan dipilih oleh Sidang Rakyat (*People Assembly*) untuk masa jabatan enam tahun. Sidang ini didominasikan oleh partai dan dipilih oleh suara terbanyak untuk masa jabatan lima tahun dan enam anggota yang ditunjuk oleh presiden. Pengadilan terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan distrik, pengadilan regional, mahkamah banding dan mahkamah agung.[[4]](#footnote-4)

Otoritas secara *de facto* berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu Somali Land, Punt Land, serta gembong militan kecil (klan) yang saling bermusuhan dan ketiganya memimpin pemerintah oposisi. Terjadi gonta-ganti rezim, mulai dari junta militer, berkuasanya Ziad Barre yang otoriter, sampai perebutan pengaruh oleh berbagai klan.

Sejak ditumbangkannya pemerintahan Mohammed Siad Barre, Somalia terus dilanda konflik. Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang fungsional. Somalia kerap diasosiasikan dengan kekerasan, konflik, kekacauan, dan kemiskinan.

Beberapa kekuatan asing baik regional maupun internasional memberikan pengaruh secara politis di Somalia, namun tidak ada yang berhasil. Beberapa kali pemerintahan transisi telah dibentuk namun gagal semua, karena tidak didukung oleh penduduk Somalia sendiri walaupun telah didanai oleh lembaga internasional.

Somalia adalah tanah strategis, yang merupakan kunci regional. Di samping memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas dan uranium, pantai Somalia mencakup Laut Merah sebagai jalur transportasi maritim internasional yang penting.[[5]](#footnote-5)

Pada tahun 2003 lahir gerakan populis bernama *Islamic Court Union* (ICU) atau Persatuan Kehakiman Islam. ICU yang dipimpin oleh Syeikh Sharif Ahmed berdiri untuk menghentikan krisis berkepanjangan dengan cara menerapkan Syariat Islam dan ingin menjadikan Somalia sebagai negara Islam. Para ulama dari berbagai suku mulai sering menyelesaikan masalah sesuai dengan koridor Syariah.

Ketika pendekatan atau penyelesaian Syariah mulai mendapatkan pendukung dari mayoritas masyarakat Somalia, gerakan ini mulai mengambil alih kekuasaan politik. Dalam waktu singkat ICU telah dapat menarik simpati warga. Pada tahun 2006, sebagian wilayah seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne, dikuasai dengan basis di Mogadishu. Syariat islam diterapkan di wilayah-wilayah ini.

Berkembangnya ICU ini didukung oleh begitu lemahnya kondisi politik dan militer negara Somalia. Tidak adanya sentralisasi kekuasaan membuat alternatif hukum Syariah dirasa cukup menjanjikan. Selain itu juga, ICU memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada warga.

Dengan adanya ICU yang berlandaskan Syariat Islam membuat kawatir negara-negara tentangga yang non-muslim seperti Ethiopia, Kenya, dan juga pihak barat. Mereka tidak ingin pengaruh Islam meluas di benua Afrika, yang dinilai bisa melahirkan kelompok-kelompok garis keras.

Gerakan Islam yang semakin luas menyebabkan semakin terbukanya konflik antara ICU dengan *Transitional Federal Government* (TFG) serta ikut campurnya Ethiopia serta Amerika Serikat yang mendukung TFG. ICU pun menjadi tandingan *Transitional Federal Government* (TFG) atau Pemerintahan Federal Transisi yang dipimpin oleh Presiden Abdullahi Yusuf yang berkuasa di Somalia.

Dalam sejarah pembentukannya TFG adalah sebuah hasil dari mediasi yang dipimpin oleh IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*) yang merupakan usaha keempat belas untuk membentuk pemerintahan di Somalia yang berfungsi sejak berakhirnya pemerintahan diktator Siad Barre pada tahun 1991. TFG dibentuk pada tahun 2004 dan sampai Juni 2005, TFG bertindak dari negara Kenya,[[6]](#footnote-6) karena pada saat itu kondisi Mogadishu tidak stabil dan tidak aman. Kemudian, pada awal tahun 2006 TFG dipindahkan ke Baidoa.

TFG inilah yang diakui oleh PBB, Amerika dan dunia internasional sebagai pemerintahan yang sah dan mendapat dukungan untuk kemudian dapat membentuk sebuah pemerintahan Somalia yang berdaulat atas Somalia secara keseluruhan. Dalam upayanya ini, TFG didukung oleh PBB, AU, dan Amerika Serikat.

TFG ini dalam perkembangannya mengalami banyak dinamika. Pada beberapa saat sebelum AMISOM muncul, TFG dilemahkan oleh persaingan antara presiden dan perdana menteri yang mengakibatkan kehilangan kontrol beberapa daerah, kehilangan kredibilitas, dan kepercayaan terhadap TFG dari warga Somalia pada tahun 2007.[[7]](#footnote-7)

ICU kecewa dengan sikap pemerintah Abdullahi Yusuf. ICU tidak sependapat karena kebijakan pemerintah yang dinilai banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Ethiopia. ICU ingin merubah Somalia menjadi negara Islam dan menghendaki Somalia mengenakan hukum Syariat Islam karena Somalia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan mereka berhak untuk menerapkan kebijakan tersebut kepada pemerintah transisi. Kebijakan yang dikeluarkan Abdullahi Yusuf saat itu dinilai tidak sesuai dengan harapan sebagian besar rakyat Somalia selama ini.

Perbedaan pandangan terhadap sistem pemerintahan negara kemudian memicu timbulnya konflik antara TFG dengan ICU. Pertentangan yang dilakukan oleh ICU menyebabkan terjadinya konflik bersenjata dengan TFG. Konflik pun akhirnya terjadi di Mogadishu. Konflik yang terjadi antara TFG dan ICU pada bulan Februari 2006 telah menimbulkan banyak korban jiwa yang berjatuhan sekitar 70 orang meninggal dunia serta ratusan orang lainnya luka-luka.[[8]](#footnote-8)

Pada kurun waktu 1 tahun dari 2006 hingga 2007 sedikitnya 14.000 korban jiwa melayang, 19.270 orang lainnya terluka dan sekitar satu setengah juta jiwa rakyat Somalia hidup terlunta-lunta di belantara hutan-hutan dan pemukiman pengungsian yang tidak menentu.[[9]](#footnote-9)

ICU menguasai mayoritas dari bagian selatan Somalia pada Oktober 2006. Namun, karena serangan TFG dan tentara Ethiopia antara Desember 2006-Januari 2007, ICU terpecah. Salah satu pecahannya, yaitu Al-Shabaab, terus melakukan perlawanan terhadap TFG dan tentara asing.[[10]](#footnote-10)

Gerilyawan Al-Shabaab adalah salah satu sayap militer ICU yang masih bertahan dan berpengaruh kuat di selatan Somalia hingga sekarang. Bahkan, sejak TFG berhasil menguasai Mogadishu dengan bantuan AMISOM, gerilyawan Al-Shabaab berganti taktik menjadi perang gerilya. Meskipun Mogadishu akhirnya berhasil dikuasai oleh TFG dan pengamanan didukung oleh AMISOM, namun serangan-serangan terus terjadi terhadap TFG, dan masyarakat sipil. Dalam perkembangannya, Al Shabaab dimasukkan kedalam daftar kelompok teroris oleh Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush Jr. pada Februari 2008.[[11]](#footnote-11) Diketahui juga pada Februari 2012, Al-Shabaab bergabung dengan jaringan AL-Qaeda.[[12]](#footnote-12)

Dalam praktik gerilyanya, Al Shabaab melakukan berbagai tindakan seperti penculikan, pembunuhan, bom bunuh diri dan serangkaian kekerasan yang menjatuhkan banyak korban sipil tidak berdosa. Tidak hanya di Somalia, Al-Shabaab pun menyebarkan aksi terornya sampai ke Kenya dan Uganda sebagai bentuk ancaman terhadap pemerintah Kenya dan Uganda yang terlibat dalam misi perdamaian Somalia.

Dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Somalia yang telah menimbulkan banyaknya korban jiwa dan juga mengakibatkan banyaknya penduduk yang harus mengungsi karena telah kehilangan rumah mereka maka Uni Afrika sebagai sebuah organisasi regional serta Somalia sebagai anggota dari Uni Afrika merasa perlu untuk turut campur dalam menanggulangi konflik di Somalia.

*Organization African Union* (OAU) atau Organisasi Kesatuan Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1963. Dalam piagamnya dijelaskan bahwa perdamaian dan keamanan harus dibentuk dan dipelihara di wilayah Afrika. Pada awal tahun 1990 beberapa konflik baru muncul di Afrika.

Pada tahun 1999 di Sierte, Libya, OAU berubah menjadi *African Union* atau Uni Afrika (UA). Selain untuk mengedepankan kerjasama dalam bidang keamanan, Uni Afrika pun mempunyai misi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan juga keterbukaan dalam bidang politik.

Undang-Undang dari Uni Afrika kemudian ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2000 dengan peresmian organisasi yang terjadi pada bulan Juli 2002. Semua negara-negara Afrika menghadiri peresmian tersebut kecuali Maroko karena menentang keanggotaan dari Sahara Barat. Dengan kelahiran Uni Afrika ini diharapkan Uni Afrika dapat menjadi aktor perdamaian dan keamanan di wilayah Afrika.

Dengan dibentuknya Uni Afrika dan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah Afrika seperti dua misi sebelumnya yaitu *An African Union Mission In Sudan* (AMIS) serta *An African Union Mission In Burundi* (AMIB), maka Uni Afrika membentuk Pasukan Perdamaian yang diberi nama *An African Union Mission In Somalia* (AMISOM) untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Somalia. Pada bulan Januari 2005 dibuatlah proposal mengenai AMISOM yang disarankan oleh Komisi Uni Afrika yang kemudian disetujui oleh *African Union Peace and Security Council* (PSC) atau Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika.

Dewan Keamanan (DK) PBB, tanggal 19 Januari 2007 menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Somalia melalui Resolusi PBB no.1744. Resolusi tersebut menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika ke Somalia. Resolusi yang mendapat dukungan penuh anggota DK PBB itu menyebutkan misi pasukan Uni Afrika di Somalia berlangsung selama enam bulan pertama. AMISOM diperpanjang mandatnya beberapa kali.

Pada tanggal 20 Agustus 2007, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1772, yang pada Bab ke-7 menegaskan untuk memperluas kewenangan Uni Afrika dalam memimpin misi di Somalia. Resolusi tersebut juga menyerukan perlindungan terhadap Ethiopia dan Pemerintahan Transisi Federal (TFG), untuk membantu mereka menjalankan fungsi pemerintahan dan keamanan mereka.

AMISOM diberi mandat untuk:

* Mendukung TFG dalam upaya menstabilkan negara, dialog lebih lanjut serta rekonsiliasi
* Memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan
* Menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, stabilisasi, rekonstruksi dan pembangunan di Somalia[[13]](#footnote-13)

Untuk memenuhi tujuan ini AMISOM juga diberi berbagai tugas termasuk untuk melindungi TFG dan infrastruktur, mendukung proses perlucutan senjata sukarela, membantu dalam pembentukan kembali dan pelatihan pasukan keamanan Somalia, serta memantau situasi keamanan di Somalia. AMISOM melakukan Operasi Dukungan Perdamaian di Somalia untuk menstabilkan situasi keamanan, termasuk mengambil alih dari Pasukan Ethiopia, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Berdasarkan permasalahan diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PERAN UNI AFRIKA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA DI SOMALIA TAHUN 2007-2013: STUDI KASUS PERAN *AN AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA* (AMISOM)”**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi dan konflik Somalia sebelum AMISOM dibentuk?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh AMISOM dalam upayanya menangani konflik bersenjata di Somalia?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pasukan AMISOM dalam menangani konflik di Somalia?
4. Sejauh mana keberhasilan AMISOM dalam menangani konflik di Somalia?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya masalah yang akan diteliti dan menjaga agar lajur penelitian sesuai dengan target yang dimaksud maka peneliti akan membatasi masalah dengan menitikberatkan penelitian tentang “peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Somalia melalui kinerja *an African Union Mission in Somalia (AMISOM) pada tahun 2007-2013*.” Dipilihnya tahun 2007 karena AMISOM mulai bertugas pada tahun tersebut, dan 2013 adalah tahun pasca dimana pasukan AMISOM berhasil merebut kota Mogadishu yang sejatinya merupakan ibu kota Somalia yang sempat menjadi basis pertahanan ICU.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Dari identifikasi dan perumusan masalah tersebut diatas maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: “**Bagaimana peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Somalia melalui *An Afican Union Mission in Somalia* (AMISOM) pada tahun 2007 sampai 2013?”**

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
	* 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data beserta informasi berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana situasi dan konflik di Somalia sebelum AMISOM dibentuk.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh AMISOM dalam usahanya menyelesaikan konflik bersenjata di Somalia
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pasukan AMISOM dalam menangani konflik bersenjata di Somalia.
4. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan AMISOM dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Somalia.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi penulis mengenai realita hubungan internasional dan fenomena internasional yang terjadi khususnya mengenai konflik yang terjadi di Negara lain.
2. Diharapkan agar dapat menambah kepekaan diri penulis terhadap konflik sebagai salah satu bagian dari dinamika hubungan internasional.
3. Diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa dalam mempelajari peran dan fungsi dari suatu organisasi kawasan serta konflik yang terjadi di Somalia.
4. Menambah informasi mengenai situasi dan kondisi Somalia dan penangan ataupun perubahan apa saja yang telah ditempuh AMISOM dalam usahanya menyelesaikan konflik bersenjata di Somalia.
5. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
6. **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**
	* 1. **Kerangka Teoritis**

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam memahami dinamika Hubungan Internasional, maka penulis meninjau beberapa teori dan pendapat dari para ahli dalam Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga dapat diungkapkan suatu hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Hubungan internasional pasca perang dingin tidak lagi hanya membahas persoalan *high politic* dimana hanya melibatkan negara dengan negara dan hanya membahas mengenai power secara kekuasaan dan militer. Isu yang muncul pun kian beragam seperti masalah Hak Asasi Manusia, Perusahaan Multinasional, gender, Organisasi Internasional, dan yang tak kalah mendominasi adalah terorisme.

Hubungan Internasional menurut Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (LP3ES. Jakarta) suatu kerangka analitis menyatakan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

**“Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”[[14]](#footnote-14)**

Sedangkan menurut KJ Holsti dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai:

**“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Pariwisata, Transportasi, Komunikasi serta perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[15]](#footnote-15)**

Hubungan Internasional mempelajari tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isyu-isyu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antar pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Sebagai fenomena sosial, HI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks. Sebab HI menyangkut semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang melintasi batas-batas negara. Seiring berjalannya waktu terdapat sejumlah isyu-isyu global yang mewarnai dinamika Hubungan Internasional, kejadian-kejadian yang fenomenal telah membuat suatu reaksi dan interaksi diantara negara-negara baik yang berkaitan langsung maupun tidak.[[16]](#footnote-16)

Hubungan Internasional berkembang menjadi sebuah kajian dimana hal tersebut dilakukan untuk memahami adanya interaksi antara *state actor* dan *non state actor* yang meliputi multi dimensi bidang. *State actor* tentu saja negara yang menjadi kajiannya tetapi untuk *non state actor* terdapat banyak pelakunya salah satunya yang sangat berperan adalah organisasi internasional.

Organisasi internasional adalah salah satu dari 6 (enam) subjek (pelaku) dalam hukum internasional, selain dari negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, pemerintah/pihak dalam sengketa, dan individu atau kelompok tertentu. Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional, organisasi perlu memiliki *“Legal Personality“.* Kedudukan/Kepribadian Hukum (Legal Personality) ini diperlukan untuk memperoleh kebebasan hukum sebagai pelaku (subjek) serta satuan tersendiri dalam pergaulan atau hubungan internasional. Syarat-syarat bagi suatu organisasi internasional untuk memiliki *“legal personality”* sendiri, adalah bahwa organisasi tersebut :

1. Merupakan himpunan (keanggotaan) negara-negara, yang bersifat tetap (permanen), serta di lengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap. Dengan kata lain, bukan sekedar komite ad-hoc yang biasanya berfungsi sementara atau jangka-waktu tertentu.
2. Memiliki perbedaan, dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi itu dengan negara anggota.[[17]](#footnote-17)

Secara konvensional Organisasi Internasional didefinisikan sebagai “Suatu pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional dan menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama diantara anggota-anggotanya dibidang keamanan, ekomoni, sosial, dan bidang-bidang lainnya”.

**Untuk dapat bertahan, sebuah organisasi secara umum sangat terkandung pada kemampuannya untuk melanjutkan pemberian keuntungan bagi anggota-anggotanya. Organisasi tersebut juga harus mampu menjalankan tugas serta fungsi utamanya melalui upaya penambahan anggota baru serta integrasi antar anggota secara keseluruhan.[[18]](#footnote-18) Dan lebih lanjut lagi, Sebuah organisasi juga harus mampu melaksanakan tugasnya bersama dengan pembangunan struktur organisasi yang akan membawa ketertiban dalam organisasi.[[19]](#footnote-19)**

Menurut Teuku May Rudy, suatu organisasi internasional dapat menyandang lebih dari satu macam penggolongan. Uni Afrika (UN) berdasarkan kegiatan administrasinya tergolong sebagai organisasi internasional antar pemerintah (*Inter-Govermental Organization* atau disingkat IGO). Berdasarkan wilayah dan keanggotaannya, Uni Afrika merupakan organisasi internasional regional, karena wilayah kegiatannya adalah berkisar di benua Afrika, dan keanggotaannya tertutup hanya untuk negara yang berada di wilayah Afrika. Sedangkan berdasarkan tujuan dan bidang kegiatan, Uni Afrika dikelompokkan sebagai organisasi internasional umum karena tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut beberapa bidang tertentu. Perlu diketahui definisi dari organisasi internasional, menurut Teuku May Rudy organisasi internasional adalah:

**“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta di harapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkeseimbangan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”**

Selain melalui suatu organisasi internasional dalam menganalisa interaksi yang terjadi dalam sistem internasional terdapat pula suatu kerjasama internasional. Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

**“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang asama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa” (Soekanto, 1990: 72).[[20]](#footnote-20)**

Kerjasama internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih.

Kerjasama terbagi lagi antara lain yaitu :

* + Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara.
	+ Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang terjadi di antara dua atau lebih negara.

 Ada tiga motif dalam melakukan suatu kerjasama internasional (Toma & Gorman, 1991: 384), yaitu:

1. Meningkatkan kepentingan nasional

2. Memelihara perdamaian

3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.[[21]](#footnote-21)

Sebagai aktor dalam hubungan internasional, organisasi internasional dianggap memberi keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Dalam hal ini organisasi internasional yang berperan dalam membantu menangani masalah yang terjadi di Somalia adalah Uni Afrika yang merupakan sebuah bentuk dari organsisasi regional di Afrika. Sebagai sebuah organisasi dengan tujuan menciptakan perdamaian di wilayah Afrika maka Uni Afrika mendirikan AMISOM sebagai sebuah bentuk dari kerjasama internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Somalia, sebagai sebuah *non state actor* Uni Afrika dapat mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh terhadap suatu negara.

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan keharusan bagi negara tersebut. Hal itu mengingat terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan agar negara tersebut tidak tersisihkan dari pergaulan internasional.

Begitu pula yang terjadi pada negara Somalia. Sebagai sebuah negara yang mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu menghentikan konflik yang terjadi di negara tersebut Somalia tentu membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Maka dari itu Uni Afrika membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Somalia dengan membentuk AMISOM. AMISOM sendiri dapat digolongkan ke dalam bentuk dari sebuah kerjasama internasional dalam menangani konflik yang terjadi di Somalia.

Penunjukan sikap suatu negara dalam menghadapi situasi lingkungan internasional maupun situasi domestik negaranya dapat dilihat dari bagaimana kebijakan luar negeri negara tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai berikut:

**“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”[[22]](#footnote-22)**

Dalam Hubungan Internasional, terdapat tipe hubungan yang sangat mencolok dan ekstrim yaitu konflik dan kerjasama. Menurut Clinton, konflik dapat didefinisikan sebagai:

**“…relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Konflik juga merupakan suatu interaksi yang antagonis mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka.”[[23]](#footnote-23)**

Konflik yang terjadi di Somalia sudah sampai ke tahap konflik terbuka yang melibatkan persenjataan. Maka, konflik di Somalia adalah konflik bersenjata. Terdapat ciri-ciri dari konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa yaitu antara lain :

* Bahwa konflik bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara.
* Konflik bersenjata mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.[[24]](#footnote-24)

Konflik bersenjata adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya, berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam, seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.[[25]](#footnote-25)

Uni Afrika pada akhirnya memasukan konflik di Somalia sebagai salah satu agendanya. Hal ini didorong oleh tekad Uni Afrika untuk memperjuangkan tujuan utamanya yaitu untuk menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika. Salah satu bentuk nyata dari tekad Uni Afrika dalam memperjuangkan tujuannya tersebut dapat dilihat dari campur tangan Uni Afrika dengan membentuk AMISOM dengan persetujuan dari PBB melalui Resolusi No. 1744 yang menyatakan bahwa resolusi tersebut menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika ke Somalia dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Somalia.

Penyelesaian konflik bersenjata suatu negara dengan melibatkan militer yang berasal dari organisasi internasional maupun regional sebagai pihak ketiga, merupakan suatu bentuk usaha untuk menurunkan eskalasi konflik dan dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan *Peace Keeping* (PK) dalam trilogi resolusi konflik.

Menurut PBB, *Peace Keeping* dapat diartikan sebagai cara untuk menolong negara-negara yang tercabik-cabik konflik untuk menciptakan kondisi untuk perdamaian yang dapat dipertahankan. Pasukan pemelihara perdamaian bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik dan menolong para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan perjanjian perdamaian yang mungkin telah mereka tandatangani. Dalam konflik Somalia ini, AMISOM sesuai dengan mandatnya diberikan tugas sebagai *Peace Keeping* (PK).

Teori di atas dapat menjadi sebuah landasan atas terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di Somalia. Adanya perebutan kekuasaan karena terdapat kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan di Somalia. Dengan banyaknya dukungan tersebut maka ICU pun menjadi sebuah kelompok yang besar. Tetapi dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat, Ethiopia dan PBB sendiri maka TFG tetap berkuasa dan dapat menghancurkan basis ICU. Tetapi dengan hancurnya basis ICU tersebut tidak membuat kelompok tersebut menjadi lemah. ICU tetap menjalankan misinya lewat Al-Shabaab dengan cara bergerilya.

Berdasarkan uraian teoritik diatas, penulis berasumsi sebagai berikut:

1. Uni Afrika sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk terlibat dalam upaya perdamaian di Somalia melalui AMISOM atas persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
	* 1. Walaupun basis ICU sudah dihancurkan, namun ICU masih memiliki basis Al-Shabaab yang memberontak dengan cara gerilya dan menggunakan tindak kekerasan yang ekstrem.
		2. Dapat terlihat dari mandat yang diberikan, AMISOM bertindak sebagai *Peace Keeping* dalam konflik bersenjata di Somalia.
		3. Melalui AMISOM, sedikit banyak telah memberikan perubahan yang positif terhadap situasi dan kondisi Somalia dalam bidang keamanan dan kemanusiaan dibandingkan saat AMISOM belum terbentuk.
2. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan asumsi dan kerangka teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

**“Uni Afrika melalui AMISOM (*African Union Mission in Somalia*) berperan dalam penyelesaian konflik bersenjata di Somalia sebagai *Peace Keeping* (PK)”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel BebasUni Afrika menangani konflik bersenjata di Somalia melalui AMISOM | 1. Penugasan AMISOM pada tahun 2007 | Data Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somaliaamisom-au.org |
| Variabel TerikatAMISOM berperan sebagai *Peace Keeping* dalam penanganan konflik bersenjata di Somalia | Mandat dari PBB kepada AMISOM pada tahun 2007. | Data Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somaliaamisom-au.org |

Tabel 1.1

1. **Skema Kerangka Teoritis**

KONFLIK SOMALIA

UNI AFRIKA

RESOLUSI KONFLIK DI SOMALIA BERJALAN DENGAN BAIK

PERAN AMISOM:

1. MENDUKUNG DAN MEMBANTU TFG
2. ANTISIPASI ANCAMAN PEMBERONTAK
3. MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF

*AN AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA* (AMISOM)

1. **METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**
	* 1. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisa yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis. Analisa ini adalah suatu tingkat analisa dimana unit analisanya (unit yang dianggap sebagai variabel independen) pada tingkatan yang lebih tinggi.

Di penelitian ini penulis menempatkan Uni Afrika dan AMISOM sebagai variabel bebas dan unit eksplanasinya dan Konflik Bersenjata di Somalia sebagai variabel terikat dan unit analisisnya.

* + 1. **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif:

Merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, dalam hal ini adalah peranan sebuah organisasi kawasan sebagai salah satu aktor hubungan internasional, yang dalam penelitian ini menyangkut peranannya dalam menyelesaikan masalah dalam kawasannya.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian. Ada tiga teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan angket.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis melakukan penelahaan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

1. **LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**
	* 1. **Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis tentunya membutuhkan sumber-sumber atau wadah sebagai tempat mencari data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut:

* Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah, Bandung

Website : <http://www.fisip-unpas.org/>

* Perpustakaan Museum Konperensi Asia Afrika

Jl. Asia Afrika no. 65, Bandung

Website : [www.asianaficanmuseum.org](http://www.asianaficanmuseum.org)

* Divisi Hubungan Internasional Polri

Gedung TNCC, Jl. Trunojoyo No. 3

Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

* *United Nation Information Centre* Indonesia

Jl. MH. Thamrin kav 3 Menara Thamrin Lantai 3A

Jakarta Pusat 10250

* + 1. **Lamanya Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis membuutuhkan waktu untuk menyusun dan mengumpulkan data serta informasi yang dijadikan sebagai refrensi penelitian ini. Yaitu terhitung sejak Desember 2014 hingga April 2015. Secara rinci dapat dilihat pada table kegiatan berikut.

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari permasalahan itu timbul, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

**BAB II DESKRIPSI UMUM UNI AFRIKA (UA)**

Pada Bab ini diuraikan mengenai variabel bebas yaitu mengenai terbentuknya Uni Afrika, resolusi konflik apa saja yang pernah Uni Arika lakukan dan hubungannya dengan An African Union Mission in Somalia (AMISOM).

**BAB III KONFLIK BERSENJATA DAN PERANG SIPIL BERKEPANJANGAN DI SOMALIA**

Pada Bab ini dijelaskan situasi dan latar belakang dari konflik bersenjata dan perang sipil di Somalia dan perkembangan kondisinya saat ini.

**BAB IV PERAN UNI AFRIKA MELALUI AMISOM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI SOMALIA**

Pada Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variabel, yaitu mengenai peranan AMISOM dalam upaya mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di Somalia, meliputi kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan, dan juga mengenai awal mula penyebaran AMISOM, dan langkah-langkah penanganan konflik melalui AMISOM. Dalam Bab ini pula akan dipaparkan kesulitan dan rintangan apa saja yang dihadapi oleh AMISOM selama menjalankan misi.

**BAB V KESIMPULAN**

Pada Bab ini diuraikan simpulan dari permasalahan penelitian. Serta penjelasan mengenai efektifitas dan keberhasilan Peranan Uni Afrika melalui AMISOM dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Somalia.

1. <http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=9282&coid=3&caid=31.html> diakses pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/africa/2004/somalia/default.stm> diakses pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://huripedia.idhrdocs.org/index.php?title=SOMALIA> diakses pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid [↑](#footnote-ref-4)
5. ThalifDeen. "Somalia: Rich Maritime Resources Being Plundered, Report Says." 2012. GlobalInformation Network. 12 April 2012 <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=2592313961&SrchMode=2&sid=2&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1332214183&clien tId=10762>. Diakases pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Stephanie Hanson dan Eben Kaplan, *Somalia’s Transitional Government*, diakses dari <http://www.cfr.org/somalia/somalias-transitional-government/p12475#p2> pada 5 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Somalia: To Move Beyond The Failed State*, Africa Report No. 147 – 23 December 2008, International Crisis Group [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/22/perang-dimogadishu-meluas-ratusan-orang-tewas/> diakses pada 6 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-8)
9. http://eramuslim.com/konflik somalia 2007.html – diakses pada 6 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-9)
10. *The Supreme Islamic Couts Union/ al-Ittihad Mahakem al-Islamiya (ICU),* diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/icu.htm> diakses pada 6 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ted Dagne, *Somalia: Current Conditions and Prospects for a Lasting Peace* (Washington DC: Congressional Research Service, 2010) hal. 5 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Somalia’s al-Shabaab join al-Qaeda*, diakses dari [www.bbc.co.uk/news/world-africa-16979440](http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16979440) diakses pada 6 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-12)
13. sumber: http://www.africaunion.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/AMISOM\_Mandat.

Htm diakses pada 6 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-13)
14. Masoed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka LP3S. (1994:204). [↑](#footnote-ref-14)
15. Holsti, K. J 1987. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bina Cipta. Bandung, hal. 27 [↑](#footnote-ref-15)
16. Materi kuliah Isyu-Isyu Global, Hubungan Internasional Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-16)
17. Materi kuliah Hukum Internasional, Hubungan Internasional Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-17)
18. Edgar H. Schein, Organization Theory : Perpective and management, Practice Hall Internasional (Ed.). (USA, 1998), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jogn H. Jackson, Organization Theory : A. Macro Perspective of Management, Practice Hall, (New Jersey, 1986), hlm. 352. [↑](#footnote-ref-19)
20. http://klikbbm.blogspot.com/2013/06/definisi-kerjasama-internasional.html [↑](#footnote-ref-20)
21. *ibid* [↑](#footnote-ref-21)
22. Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-konflik-sosial-menurut-para.html#_> diakses pada 10 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://docs.google.com/document/d/1owVDy5PGPpyCgiMPoqS228wYMpEf7ZWZ72FM34SJ5Kw/edit?pli=1> diakses pada 11 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-24)
25. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6165560 – diakses pada 11 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-25)